

Hubungan Tingkat Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Tenaga Kefarmasian dengan Perencanaan Pengadaan Obat di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

Hj. Erny Kurniati¹, Zuhropal Hadi²
Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
*email, ernyhasan92@ gmail.com

ABSTRACT

Drug procurement planning is an important stage in meeting the need for drugs in a health service. The purpose of the study was to determine and analyze the level of knowledge, attitudes and skills of pharmacists with planning for drug procurement at the Puskesmas in the work area of the Banjarmasin City Health Office. This research is an analytic survey with a cross sectional approach. The number of research samples was 78 respondents. The sampling technique was Total Sampling. Analysis of the data using the Chi-Square test. The results of the study showed that there were 49 people who had good drug procurement planning (62.8%). The level of knowledge of good pharmacists was 56 people (71.8%). The attitude of positive pharmaceutical staff is 55 people (70.5%) The skills of capable pharmacists are 55 people (70.5%). There is a relationship between the level of knowledge, attitudes and skills of pharmacists with planning for drug procurement at the Puskesmas in the work area of the Banjarmasin City Health Office. It is recommended that the Banjarmasin City Health Office conduct guidance by providing training on the management of drug management and health supplies at the puskesmas

*Keywords: Level of Knowledge, Attitudes, Skills, Drug Procurement Planning
Bibliography (35 : 2014-2019)
Quantity : 202 word*

ABSTRAK

Perencanaan pengadaan obat merupakan tahap yang penting dalam memenuhi kebutuhan obat-obatan di suatu pelayanan kesehatan. Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan tenaga kefarmasian dengan perencanaan pengadaan Obat di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan kota Banjarmasin. Penelitian ini bersifat survei analitik dengan pendekatan *cross sectional*. Jumlah sampel penelitian 78 responden Teknik pengambilan sampel yaitu *Total Sampling*. Analisis data menggunakan uji *Chi-Square* Hasil penelitian diketahui perencanaan pengadaan obat yang baik berjumlah 49 orang (62,8 %). Tingkat pengetahuan tenaga kefarmasian yang baik berjumlah 56 orang (71,8 %). Sikap tenaga kefarmasian positif berjumlah 55 orang (70,5 %) Keterampilan tenaga kefarmasian mampu berjumlah 55 orang (70,5 %). Ada hubungan tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan tenaga kefarmasian dengan perencanaan pengadaan obat di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan kota Banjarmasin. Disarankan agar Dinas Kesehatan kota Banjarmasin melakukan pembinaan dengan memberikan pelatihan mengenai manajemen pengelolaan obat serta perbekalan kesehatan di puskesmas

**Kata Kunci : Tingkat Pengetahuan, Sikap, Keterampilan, Perencanaan Pengadaan Obat
Kepustakaan (35 : 2014-2019)
Jumlah : 202 kata**

PENDAHULUAN

Tahap perencanaan obat merupakan tahap yang penting karena faktor perencanaan obat yang tidak tepat, belum efektif dan kurang efisien berakibat kepada tidak terpenuhinya kebutuhan obat-obatan di suatu pelayanan kesehatan. Jika suatu perencanaan di Puskesmas direncanakan dengan tidak baik maka akan terjadi kekurangan atau kelebihan (pemborosan obat) di suatu puskesmas/UPK. Kegiatan dalam perencanaan terdiri dari kegiatan pemilihan atau seleksi obat, kompilasi pemakaian obat, perhitungan kebutuhan obat, proyeksi kebutuhan obat dan lain sebagainya.

Perencanaan dan pengadaan obat di Puskesmas melibatkan banyak pihak yaitu Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan Gudang Farmasi Kota Banjarmasin. Berdasarkan Laporan Pemakaian dan Lembar Permintaan Obat (LPLPO) di Dinas Kesehatan kota Banjarmasin.

Berdasarkan observasi pendahuluan yang peneliti lakukan terdapat permasalahan perencanaan dan pengadaan di Puskesmas Dinas Kesehatan kota Banjarmasin antara lain pada E-katalog harga obatnya cepat berubah dengan periode hanya selama 2 tahun. Perubahan harga idealnya pada bulan Maret semua harga seharusnya sudah ditayangkan oleh Pedagang Besar Farmasi (PBF) tetapi kenyataannya harga baru pada bulan Juli semua ditayangkan di E-katalog LKPP sehingga perencanaan dan pengadaan pembelian obat setiap bulan tidak sesuai. Pada perencanaan pengadaan obat di Puskesmas sebagian tenaga kefarmasian terkadang tidak melihat stok obat yang sudah *Expired Date*. Padahal dalam perencanaan pengadaan obat juga perlu melihat *Expired Date* Obat yang ada di Puskesmas.

Selain itu permasalahan selanjutnya yaitu pada obat yang sudah dipesan di aplikasi E-katalog LKPP yang menang tender yaitu obat sudah dipesan tetapi PBF tidak dapat memenuhi pesanan kita atau sudah turun tayang. Permintaan atau pesanan obat yang sudah dipesan oleh Dinas Kesehatan kota Banjarmasin tidak dapat dipenuhi dengan alasan bahan baku pembuatan obat tidak ada atau kosong sehingga tidak bisa memenuhi permintaan. Di akhir tahun penganggaran baru diberitahukan atau di *cut up* oleh PBF dengan alasan kosong bahan baku

pembuatan obatnya tersebut. Hal ini berdampak pada gudang obat di Puskesmas dan di Dinas Kesehatan kota Banjarmasin karena akan terjadi kekosongan obat.

Anggaran harga obat menjadi berubah karena tidak sesuai lagi dengan perencanaan awal sehingga harus menunggu lagi di anggaran perubahan. Pembelian obat bisa dilakukan dengan menggunakan harga reguler menjadi naik harga obatnya. Bisa membeli dengan harga reguler tetapi melakukan perubahan ke Bakeuda kota Banjarmasin dengan mengajukan harga baru akhirnya volume berkurang dari perencanaan dan pengadaan awal. Akhirnya obat yang dapat dibeli jumlahnya kecil tidak lagi sesuai perencanaan awal. Perbedaan antara jumlah yang diminta dan diterima ini dipengaruhi oleh perencanaan dan pengadaan obat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan kota Banjarmasin.

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menganalisis hubungan tingkat pengetahuan, sikap, keterampilan tenaga kefarmasian dengan perencanaan pengadaan obat di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan kota Banjarmasin.

METODE.

Penelitian ini bersifat survei analitik menggunakan pendekatan *cross sectional*. Populasi kasus ialah seluruh tenaga kesehatan farmasi yaitu apoteker dan tenaga teknis kefarmasian di 26 Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tahun 2020 berjumlah 78 orang Sampel penelitian berjumlah 78 responden. Cara pengambilan sampel adalah *Total sampling*. Variabel bebas adalah tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan. Variabel terikat adalah perencanaan pengadaan obat. Untuk mengukur hubungan antar variabel akan dilakukan menggunakan statistik dengan menggunakan uji *Chi-Square*.

HASIL

Analisis Univariat.

Tabel 1

**Distribusi Frekuensi Perencanaan Pengadaan
Obat di Puskesmas Wilayah Kerja
Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin**

Variabel	Kategori	n	%
Perencanaan Pengadaan Obat	Baik	49	62,8
	Cukup	29	37,2
	Kurang	0	0

Sumber : Data Primer, 2022

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 78 responden tenaga kefarmasian sebagian besar mempunyai perencanaan pengadaan obat yang baik berjumlah 49 orang (62,8 %).

Tabel 2

**Distribusi Frekuensi Berdasarkan
Variabel Penelitian**

Variabel	Kategori	n	%
Pengetahuan	Baik	56	71,8
	Cukup	22	28,2
	Kurang	0	0
Sikap	Positif	55	70,5
	Negatif	23	29,5
Keterampilan Mampu	Mampu	55	70,5
	Kurang Mampu	23	29,5

Sumber : Data Primer, 2022

Berdasarkan tabel 2 diketahui dari 78 responden tenaga kefarmasian sebagian besar mempunyai tingkat pengetahuan yang baik berjumlah 56 orang (71,8 %), mempunyai sikap positif berjumlah 55 orang (70,5 %) dan mempunyai keterampilan mampu berjumlah 55 orang (70,5 %).

Analisis Bivariat

**Hubungan Tingkat Pengetahuan Tenaga
Kefarmasian dengan Perencanaan Pengadaan
Obat**

Tabel 3

**Hubungan Tingkat Pengetahuan Tenaga
Kefarmasian dengan Perencanaan
Pengadaan Obat Di Puskesmas
Wilayah Kerja Dinas Kesehatan
Kota Banjarmasin**

Tingkat Pengetahuan	Perencanaan Pengadaan Obat		Total	p			
	Baik	Cukup					
	n	%	n	%	n	%	
Baik	40	71,4	16	28,6	56	100	0,012 < 0,05
Cukup	9	40,9	13	59,1	22	100	
Total	49	62,8	29	37,2	78	100	

Sumber : Data Primer, 2022

Tingkat pengetahuan tenaga kefarmasian baik 71,4 % dibandingkan pada tingkat pengetahuan cukup 40,9 %. Sementara proporsi perencanaan pengadaan obat cukup lebih tinggi pada tingkat pengetahuan tenaga kefarmasian cukup 59,1 % dibandingkan pada tingkat pengetahuan baik 28,6 %.

Hasil uji statistik dengan *Chi-square* didapatkan nilai $p = 0,012 < \alpha 0,05$ maka H_0 di tolak artinya dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan tenaga kefarmasian dengan

perencanaan pengadaan obat di wilayah kerja Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

Hubungan Sikap Tenaga Kefarmasian dengan Perencanaan Pengadaan Obat

Tabel 4

Hubungan Sikap Tenaga Kefarmasian dengan Perencanaan Pengadaan Obat Di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

Sikap	Perencanaan		Total	p
	Baik	Cukup		
	n	%	n	%
Positif	39	70,9	55	100
Negatif	10	43,5	13	56,5
Total	49	62,8	29	37,2

Sumber : Data Primer, 2022

Sikap tenaga kefarmasian positif 70,9% dibandingkan pada sikap negatif 43,5%. Sementara proporsi perencanaan pengadaan obat cukup lebih tinggi pada sikap tenaga kefarmasian negatif 56,5 % dibandingkan pada sikap positif 29,1 %.

Hasil uji statistik dengan *Chi-square* didapatkan nilai $p = 0,022 < \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak artinya dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sikap tenaga kefarmasian dengan perencanaan pengadaan obat di wilayah kerja Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

Hubungan Keterampilan Tenaga Kefarmasian dengan Perencanaan Pengadaan Obat

Tabel 5

Hubungan Keterampilan Tenaga Kefarmasian dengan Perencanaan Pengadaan Obat Di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

Keterampilan	Perencanaan		Total	p
	Baik	Cukup		
	n	%	n	%
Mampu	39	72,2	15	27,8
Kurang	10	41,7	14	58,3
Total	49	62,8	29	37,2

Sumber : Data Primer, 2022

Keterampilan tenaga kefarmasian mampu 72,5% dibandingkan pada keterampilan kurang mampu 41,7 %. Sementara proporsi perencanaan pengadaan obat cukup lebih tinggi pada keterampilan tenaga kefarmasian tidak mampu 58,3 % dibandingkan pada keterampilan mampu 27,8 %.

Hasil uji statistik dengan *Chi-square* didapatkan nilai $p = 0,010 < \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak artinya dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara keterampilan tenaga kefarmasian dengan perencanaan pengadaan obat di wilayah kerja Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

Pembahasan

Perencanaan Pengadaan Obat di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui sebagian besar responden yang melakukan perencanaan di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin berjenis kelamin perempuan berjumlah 64 orang. Sebagian besar pekerjaan responden adalah Tenaga Teknis Kefarmasian dan yang paling sedikit melakukan perencanaan pengadaan obat adalah Apoteker Non PNS dengan tingkat pendidikan sebagian responden adalah Tamat D3. Jenis tenaga kefarmasian sendiri terdiri dari apoteker dan tenaga teknis kefarmasian yang dapat melakukan pekerjaan kefarmasian di Puskesmas. Banyaknya tenaga kefarmasian yang menempuh pendidikan hingga D3 Farmasi dikarenakan lulusan D3 Farmasi tergolong sebagai Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) yang dapat melakukan pelayanan kefarmasian seperti produksi sediaan farmasi, pendistribusian sediaan farmasi dan menjadi asisten penelitian (Kementerian Kesehatan RI, 2016)

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 78 responden tenaga kefarmasian sebagian besar mempunyai perencanaan pengadaan obat yang baik. Sedangkan Puskesmas yang perencanaan pengadaan obatnya cukup berjumlah 11 buah Puskesmas antara lain Puskesmas Kelayan Timur, Puskesmas Pemurus Dalam, Puskesmas Gedang Hanyar, Puskesmas Beruntung, Puskesmas Sei Bilu, Puskesmas Kuin Raya, Puskesmas Sei Mesa, Puskesmas Sei Jingah, Puskesmas Pelambuan, Puskesmas Pemurus Baru dan Puskesmas Pekapuran Raya. Para pelaksana pada hasil penelitian ini adalah tenaga kefarmasian di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dalam melaksanakan program dengan perencanaan yang baik maka setiap pelaksana akan memahami rencana tersebut dan akan merangsang para pelaksana untuk dapat melakukannya sesuai dengan beban tugas masing-masing dengan sebaik-baiknya.

Perencanaan pengadaan obat yang baik dapat membantu tenaga kefarmasian untuk membuat perencanaan pada masa depan atau tahun yang akan datang, jadi hasil yang diperoleh dari suatu pekerjaan perencanaan pengadaan obat pada saat ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman untuk menyusun rencana kerja pada masa depan dan demikian seterusnya.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian teori perencanaan yaitu Perencanaan obat adalah suatu proses kegiatan seleksi obat untuk menetapkan jenis dan jumlah obat yang sesuai dengan pola penyakit dan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar termasuk program kesehatan yang telah ditetapkan (Depkes, 1990). Adapun tujuan dari perencanaan kebutuhan obat adalah untuk mendapatkan : 1. Jenis dan jumlah yang tepat sesuai kebutuhan; 2. Menghindari terjadinya kekosongan obat Meningkatkan penggunaan obat secara rasional; dan 4. Meningkatkan efisiensi penggunaan obat.

Tingkat Pengetahuan Tenaga Kefarmasian dengan Perencanaan Pengadaan Obat di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 78 responden tenaga kefarmasian sebagian besar mempunyai tingkat pengetahuan yang baik berjumlah 56 orang (71,8 %) dan mempunyai tingkat pengetahuan yang cukup berjumlah 22 orang (28,2 %). Tingkat pengetahuan yang cukup tersebut terdapat pada Tenaga Teknis Kefarmasian Non PNS berjumlah 6 orang (7,7 %), Tenaga Teknis Kefarmasian PNS berjumlah 11 orang (14,1 %) dan Apoteker berjumlah 5 orang (6,4 %). Tenaga kefarmasian yang mempunyai tingkat pengetahuan yang cukup mempunyai tingkat pendidikan tamat D3 berjumlah 17 orang responden dan tamat pendidikan S1/S2 berjumlah 5 orang responden.

Tenaga kefarmasian merupakan bagian dari tenaga kesehatan, yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/ atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya perencanaan pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Peran tenaga kefarmasian sebagai tenaga kesehatan

perlu memberikan pelayanan kefarmasian yang sesuai dengan standar pelayanan kefarmasian di apotek, maka dari itu sebagai seorang tenaga kefarmasian selayaknya memiliki pengetahuan mengenai perencanaan pengadaan obat di Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

Sesuai dengan teori menurut A.Wawan dan Dewi M (2010) bahwa faktor faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan, yaitu : faktor Internal antara lain: 1) Pendidikan; 2). Pekerjaan 3). Usia dan juga faktor Eksternal antara lain: 1). Faktor Lingkungan ; 2). Sosial Budaya.

Sikap Tenaga Kefarmasian dengan Perencanaan Pengadaan Obat di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 78 responden tenaga kefarmasian sebagian besar mempunyai sikap positif berjumlah 55 orang (70,5 %) dan mempunyai sikap negatif berjumlah 23 orang (29,5 %). Tenaga kefarmasian yang mempunyai sikap yang negatif mempunyai tingkat pendidikan tamat D3 berjumlah 18 orang responden dan tamat pendidikan S1/S2 berjumlah 5 orang responden.

Berdasarkan hasil penelitian sikap positif tenaga kefarmasian dalam membuat perencanaan pengadaan obat di Puskesmas memberikan efek yang juga positif dan berperan dalam pembentukan karakter dan sistem hubungan antar kelompok dalam membuat suatu perencanaan pengadaan obat di Puskesmas. Pilihan-pilihan yang ditentukan untuk membuat suatu perencanaan obat sudah terpola berdasarkan lingkungan dan pengaruhnya terhadap perubahan atau tujuan yang ingin di capai dalam perencanaan pengadaan obat di Puskesmas.

Keterampilan Tenaga Kefarmasian dengan Perencanaan Pengadaan Obat di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 78 responden tenaga kefarmasian sebagian besar mempunyai keterampilan mampu berjumlah 55 orang (70,5 %) sedangkan responden yang mempunyai keterampilan kurang mampu berjumlah 23 orang (29,5 %). Tenaga kefarmasian yang mempunyai keterampilan tidak mampu mempunyai tingkat pendidikan tamat D3

berjumlah 18 orang responden dan tamat pendidikan S1/S2 berjumlah 5 orang responden.

Responden yang mempunyai keterampilan tidak mampu pada usia 22 tahun berjumlah 2 orang, usia 25 tahun berjumlah 1 orang, usia 29 tahun berjumlah 2 orang, usia 30 tahun berjumlah 1 orang, usia 33 tahun berjumlah 2 orang, usia 35 tahun berjumlah 2 orang, usia 36 tahun berjumlah 1 orang, , usia 37 tahun berjumlah 2 orang, usia 41 tahun berjumlah 1 orang, usia 46 tahun berjumlah 1 orang, usia 50 tahun berjumlah 1 orang, usia 51 tahun berjumlah 1 orang, usia 52 tahun berjumlah 2 orang, dan usia 53 tahun berjumlah 3 orang.

Untuk mencapai suatu tingkat keterampilan yang baik dalam perencanaan pengadaan obat di Puskesmas, tenaga kefarmasian Puskesmas di kota Banjarmasin perlu memperhatikan hal sebagai berikut, pertama, faktor individu atau pribadi yaitu kemauan serta keseriusan dari individu itu sendiri berupa motivasi yang besar untuk menguasai keterampilan yang diajarkan. Kedua, faktor proses belajar mengajar menunjuk kepada bagaimana kondisi belajar dapat disesuaikan dengan potensi individu, dan lingkungan sangat berperan dalam penguasaan keterampilan. Ketiga, faktor situasional menunjuk pada metode dan teknik dari latihan atau praktek yang dilakukan.

Pada dasarnya keterampilan tenaga teknis kefarmasian merupakan hal yang bersifat individual, setiap individu akan memiliki tingkat keterampilan yang berbeda tergantung pada kemampuan dan pengalamannya. Keterampilan kerja memiliki manfaat yang besar bagi individu, perusahaan dan masyarakat. Bagi individu keterampilan kerja dapat meningkatkan prestasinya sehingga memperoleh balas jasa yang sesuai dengan prestasinya.

Selain itu keterampilan setiap orang harus terus diasah dan dikembangkan melalui program pelatihan ataupun bimbingan. Pelatihan dan sebagainya harus didukung oleh kemampuan dasar yang sudah dimiliki orang tersebut dalam dirinya. Kemampuan dasar ini dapat menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat dan bernilai tambah bagi dirinya maupun bagi orang lain apabila dikombinasikan dengan bimbingan ataupun pelatihan.

Hubungan Tingkat Pengetahuan Tenaga Kefarmasian dengan Perencanaan Pengadaan

Obat di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa dari 78 responden tenaga kefarmasian sebagian besar mempunyai tingkat pengetahuan yang baik berjumlah 56 orang (71,8 %). Hasil uji statistik dengan *Chi-square* didapatkan nilai $p = 0,012 < \alpha 0,05$ maka H_0 di tolak artinya dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara tingkat pengetahuan tenaga kefarmasian dengan perencanaan pengadaan obat di wilayah kerja Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Artinya jika tingkat pengetahuan tinggi maka perencanaan pengadaan obat juga akan semakin baik. Pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan pemicu awal tingkah laku termasuk tingkah laku dalam bekerja, pengetahuan sangat diperlukan dalam perubahan pola pikir dan perilaku (Notoatmodjo, 2007).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pengetahuan pengelola obat/tenaga kefarmasian Puskesmas menyusun perencanaan obat berdasarkan epidemiologi kemudian disesuaikan dengan kebutuhan obat di puskesmas. Menurut kepala instalasi farmasi Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin petugas farmasi mengetahui tentang metode yang digunakan dalam perencanaan pengadaan obat yaitu metode konsumsi dimana dihitung berdasarkan rata-rata pemakaian per tahun kemudian dikompilasikan dengan ketersediaan obat selama 18 bulan kedepan. Sedangkan menurut teori, metode perencanaan obat yang dilakukan adalah berdasarkan metode konsumsi, karena kebutuhan obat disesuaikan dengan tingkat konsumsi di puskesmas tersebut. Disini dapat diketahui bahwa rencana kebutuhan obat puskesmas disesuaikan dengan pemakaian obat di puskesmas selama setahun kemudian diserahkan kepada instalasi farmasi untuk dikompilasikan dengan puskesmas yang lain.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Hasanah Putri AD. Sinaga dengan hasil penelitian ada hubungan antara tingkat pengetahuan apoteker penanggungjawab apotek dengan implementasi PMK No. 73 tahun 2016 dengan menunjukkan p value 0,004. Hasil Penelitian yang dilakukan di kabupaten Sleman menunjukkan bahwa apoteker mengetahui makna *medication record* tetapi 60% apotek tidak dilaksanakan (Hartini, 2010).

Penelitian di Tamil Nadu menyatakan bahwa sangat sedikit dari apoteker yang

memiliki pengetahuan tentang standar pelayanan kefarmasian (Rubica dkk., 2018).

Hubungan Sikap Tenaga Kefarmasian dengan Perencanaan Pengadaan Obat di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian penelitian diperoleh proporsi perencanaan pengadaan obat lebih tinggi pada sikap tenaga kefarmasian positif 70,9% dibandingkan pada sikap negatif 43,5%. Sementara proporsi perencanaan pengadaan obat cukup lebih tinggi pada sikap tenaga kefarmasian negatif 56,5 % dibandingkan pada sikap positif 29,1 %.

Hasil uji statistik dengan *Chi-square* didapatkan nilai $p = 0,022 < \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak artinya dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara sikap tenaga kefarmasian dengan perencanaan pengadaan obat di wilayah kerja Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. arena responden memiliki pengetahuan yang cukup yang dapat mempengaruhi sikap tenaga kefarmasian dalam perencanaan pengadaan obat. Pengetahuan yang dimiliki seseorang merupakan awal atau pemicu seseorang untuk menunjukkan sikap termasuk sikap dalam membuat perencanaan pengadaan obat. Hasil ini seperti yang disebutkan pada penelitian Galistiani (2016), bahwa terdapat hubungan dengan kekuatan cukup antara tingkat pengetahuan dan sikap tenaga kefarmasian dalam melakukan pengelolaan perbekalan farmasi.

Hal ini didukung pada penelitian Deviani (2017), bahwa pengetahuan tenaga kefarmasian yang baik dapat mendukung sikap tenaga kefarmasian yang baik juga.

Hubungan Keterampilan Tenaga Kefarmasian dengan Perencanaan Pengadaan Obat di Puskesmas Wilayah Kerja Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh proposi perencanaan pengadaan obat lebih tinggi pada keterampilan tenaga kefarmasian mampu 72,5% dibandingkan pada keterampilan kurang mampu 41,7 %. Sementara proporsi perencanaan pengadaan obat cukup lebih tinggi pada keterampilan tenaga kefarmasian tidak mampu 58,3 % dibandingkan pada keterampilan mampu 27,8 % . Keterampilan tenaga kefarmasian

termasuk kategori tidak mampu dapat disebabkan beberapa faktor, diantaranya umur, pendidikan akhir dan lama bekerja responden.

Hasil uji statistik dengan *Chi-square* didapatkan nilai $p = 0,010 < \alpha 0,05$ maka H_0 ditolak artinya dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara keterampilan tenaga kefarmasian dengan perencanaan pengadaan obat di wilayah kerja Puskesmas Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.

Penelitian ini sesuai dengan pendapat Foster (2001) dalam Roviya (2012), pengalaman kerja adalah sebagai suatu ukuran tentang lama waktu atau masa kerja yang telah ditempuh seseorang dalam memahami tugas-tugas dalam suatu pekerjaan dan telah melaksanakannya dengan baik. Paspuningsih (2004) dalam Roviya (2015) juga mengemukakan pengalaman kerja seseorang menunjukkan jenis-jenis pekerjaan yang pernah dilakukan seseorang dan memberikan peluang yang besar bagi seorang, semakin terampil melakukan pekerjaan dan semakin sempurna pola pikir dan sikap dalam bertindak untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

PENUTUP

Kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pengadaan obat di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan kota Banjarmasin adalah tenaga kefarmasian mempunyai perencanaan pengadaan obat yang baik berjumlah 49 orang (62,8 %) dan mempunyai perencanaan pengadaan obat yang cukup berjumlah 29 orang (37,2 %)
2. Tingkat pengetahuan tenaga kefarmasian tentang perencanaan pengadaan obat di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan kota Banjarmasin adalah tenaga kefarmasian mempunyai tingkat pengetahuan yang baik berjumlah 56 orang (71,8 %) dan mempunyai tingkat pengetahuan yang cukup berjumlah 22 orang (28,2 %).
3. Sikap tenaga kefarmasian tentang perencanaan pengadaan obat di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan kota Banjarmasin adalah tenaga kefarmasian mempunyai sikap positif berjumlah 55 orang (70,5 %) dan

mempunyai sikap negatif berjumlah 23 orang (29,5 %)

4. Keterampilan tenaga kefarmasian tentang perencanaan pengadaan obat di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan kota Banjarmasin adalah tenaga kefarmasian mempunyai keterampilan mampu berjumlah 55 orang (70,5 %) dan kurang mampu berjumlah 23 (29,5%).
5. Ada hubungan tingkat pengetahuan tenaga kefarmasian dengan perencanaan pengadaan obat di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan kota Banjarmasin didapatkan nilai $p = 0,012 < \alpha 0,05$
6. Ada hubungan sikap tenaga kefarmasian dengan perencanaan pengadaan obat di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan kota Banjarmasin didapatkan nilai $p = 0,022 < \alpha 0,05$.
7. Ada hubungan keterampilan tenaga kefarmasian dengan perencanaan pengadaan obat di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan kota Banjarmasin didapatkan nilai $p = 0,010 < \alpha 0,05$.

Adapun saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut :

1. Bagi Responden
Agar lebih meningkatkan lagi tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan tenaga kefarmasian tentang perencanaan pengadaan obat supaya pelayanan kefarmasian di Puskesmas dapat terlaksana dengan baik.
2. Dinas Kesehatan.
Agar lebih meningkatkan tingkat pengetahuan, sikap dan keterampilan tenaga kefarmasian tentang perencanaan pengadaan obat di Puskesmas wilayah kerja Dinas Kesehatan kota Banjarmasin dengan mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan mengenai peningkatan kapasitas dan pengembangan diri seluruh tenaga teknis kefarmasian agar lebih profesional dalam menjalankan tugasnya dan memahami tentang perencanaan pengadaan obat.
3. Peneliti Selanjutnya
Bagi peneliti lain agar dapat melakukan perbaikan penelitian serupa dengan jumlah sampel yang lebih besar dan cakupan wilayah yang lebih luas lagi dan dengan variabel-variabel penelitian yang berbeda

seperti variabel tingkat pendidikan, variabel umur dan sebagainya.

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta

Notoatmodjo, S. (2007). *Ilmu Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Seni.* Jakarta: Rineka Cipta. Halaman 124-125.

Notoadmojo. S. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan.* Jakarta : Rineka Cipta

Notoatmodjo, S. (2011). *Kesehatan Masyarakat, Ilmu & Seni.* Jakarta : Rineka Cipta

Notoatmodjo, S. (2012). *Metode Penelitian Kesehatan.* Jakarta : Rineka Cipta.

Notoatmodjo, S. (2014). *Promosi Kesehatan Dan Perilaku Manusia.* Jakarta : Rineka Cipta

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2017). *Perubahan Penggolongan Psikotropika.* Jakarta

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2014). *Perencanaan Obat.* Jakarta

Saryono. (2010). *Metodologi Penelitian Kesehatan Penuntun Praktis Bagi Pemula.* Yogyakarta: Mitra Cendekia.

REFERENSI

A.Wawan Dan Dewi M. (2010). *Teori & Pengukuran Pengetahuan, Sikap, Dan Perilaku Manusia.* Yogyakarta : Nuha Medika

Azwar, S. (2011). *Sikap dan Perilaku Dalam: Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar

Arikunto. (2015). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik,* Jakarta: Rineka Cipta.

Bappenas, (2019). *Penyediaan Obat, Vaksin dan Alat Kesehatan.* Jakarta.

Djumali, dkk. (2014). *Landasan Pendidikan.* Yogyakarta : Gava Media.

Edy Sutrisno. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia.* Cetakan ke-8. Jakarta : Prenada Media Group

Febriawati. H. (2013). *Manajemen Logistik Farmasi Rumah Sakit.* Jakarta: Gosyen Publishing.

Depkes RI, 2004, Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor.1027/Menkes/SK/IX/2004

Gaspersz, Vincent. (2012). *All In One: Production and Inventori Management.* Edisi 8, Bogor

Kaplan et al. (2012). *Menerapkan Strategi Menjadi Aksi.* Jakarta: Erlangga.

Kemenkes RI. (2015). *Pedoman Penggunaan Obat Bebas Dan Bebas Terbatas. Bina Kefarmasian Dan Alat Kesehatan*